

**PERSEPSI AKUNTAN YANG BEKERJA PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP
INDEPENDENSI PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK**

Studi Kasus Pada Empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Akuntansi**



Oleh:

Ignatius Noviwidianto

NIM : 002114153

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

**PERSEPSI AKUNTAN YANG BEKERJA PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP
INDEPENDENSI PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK**
Studi Kasus pada Empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta

Oleh:

Ignatius Noviwidianto

NIM : 002114153



Pembimbing I

Drs. FA. Joko Siswanto, M.M., Akt.

Tanggal: 9 Januari 2007

Pembimbing II

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 31 Januari 2007

PERSEPSI AKUNTAN YANG BEKERJA PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP
INDEPENDENSI PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK
Studi Kasus pada Empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta

SKRIPSI

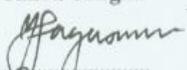
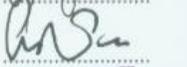
Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Ignatius Noviwidianto
NIM: 002114153

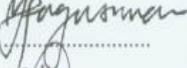
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 21 Maret 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustina Wansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Drs. FA. Joko Siswanto, M.M., Akt.
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustina Wansari, M.M., Akt.
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 30 Maret 2007

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



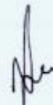

(Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 29 Desember 2006

Penulis



Ignatius Noviwidianto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PANITIA PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Independen	7
B. Auditor Independen	11

C. Penunjukan Auditor Independen	13
D. Membangun Pemahaman dengan Klien	14
E. Tanggung Jawab Auditor Independen	16
F. Pelaporan Apabila Akuntan Publik Tidak Independen	16
G. Komite Audit	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Subyek dan Obyek Penelitian	28
C. Data yang Dicari	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Variabel Penelitian	30
F. Teknik Pengambilan Sampel	30
G. Teknik Pengujian Instrumen	32
H. Uji Normalitas Data	34
I. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR AKUNTAN PUBLIK	42
A. Gambaran Umum Perusahaan	42
B. Profesi Akuntan Publik	45
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Responden	47
B. Uji Instrumen	50
C. Uji Normalitas Data	54
D. Analisis Data	55

BAB VI PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan Penelitian	65
C. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III. 1	Skor Penilaian Kuesioner 30
Tabel IV. 1	Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta..... 44
Tabel IV. 2	Kantor Akuntan Publik yang diteliti 44
Tabel V. 1	Umur Respondedn 48
Tabel V. 2	Jabatan Responden 48
Tabel V. 3	Lama Bekerja Responden 49
Tabel V. 4	Pendidikan Terakhir Responden 49
Tabel V. 5	Uji Validitas Hubungan Keuangan 51
Tabel V. 6	Uji Validitas Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan Klien 51
Tabel V. 7	Uji Validitas Jasa-jasa Lainnya Selain Audit 51
Tabel V. 8	Ujj Validitas <i>Fee</i> Audit 52
Tabel V. 9	Uji Validitas Independensi Pemeriksaan Akukntan Publik 52
Tabel V. 10	Uji Reliabililtas 53
Tabel V. 11	Uji Normalitas Data 54
Tabel V. 12	Hasil Pengolahan Data Persepsi Akuntan Publik terhadap Independensi Pemeriksaan 55
Tabel V. 13	Model Summary 56
Tabel V. 14	ANOVA 58
Tabel V. 15	Coefficients 59

ABSTRAK

**PERSEPSI AKUNTAN YANG BEKERJA PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP
INDEPENDENSI PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK**
(Studi Kasus pada Empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta)

Ignatius Noviwidianto

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik dan mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner. Pengukuran dilakukan dengan skala *likert*. Teknik analisis data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: (1) dengan menggunakan uji normalitas data, (2) uji frekuensi dan (3) uji hipotesis yang disertai langkah-langkah yang mendukung pembuatan keputusan. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Dari hasil analisis data yang diperoleh dengan teknik analisis data di atas menunjukkan bahwa persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik adalah independensi pemeriksaan akuntan publik baik. Dan faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik adalah *fee* audit karena semakin akuntan kurang memahami *fee* audit dalam pemeriksaan maka pemeriksaan akuntan publik akan terganggu. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,311 yang berarti setiap pengurangan 1 *fee* audit maka akan mengurangi independensi pemeriksaan akuntan publik sebesar 0,311.

ABSTRACT

ACCOUNTANT'S PERCEPTION WORKING AT THE PUBLIC ACCOUNTANT OFFICE ON THE INDEPENDENCY of PUBLIC ACCOUNTANT'S INSPECTION

(A Case Study at Four Public Accountant Offices in Yogyakarta)

Ignatius Noviwidianto

University of Sanata Dharma

Yogyakarta

2007

This research targets were to know the accountant's perception working at the Public Accountant Office on the independency of public accountant's inspection and to know the dominant factor influencing the independency of public accountant's inspection. This research was a case study at four Public Accountant Offices in Yogyakarta. The research data were obtained from questionnaire distribution. Measurement was done with the likert scale. The data analysis technique to answer the problem were: (1) by using test of data normality, (2) frequency test and (3) hypothesis test accompanied by the steps supporting decision making. The analysis tool in this research was multiple linear regression.

The analysis result on the data obtained with those analysis techniques indicated that the accountant's perception working at the Public Accountant Office on the independency of public accountant's inspection was that public accountant inspection's independency was good. And the most dominant factor influencing the independency of inspection of public accountant was the audit fee because if the accountant was less comprehend about the audit fee in inspection hence the inspection of public accountant will be disturbed. In this research it was shown with the regression coefficient equal to - 0,311 meaning that a unit reduction in audit fee will reduce the independency of inspection of public accountant as big as 0,311.

*Jangan takut
dengan apa yang terjadi*

Tapi

menikmati apa yang sudah terjadi

Jangan sesali apa yang telah hilang dari hidupmu

dan

Berjuanglah dengan apa yang masih ada dalam dirimu

Kupersembahkan karya sederhana ini buat :

Gusti Yesus yang sudah memberikan keindahan hidup.

Bunda Maria yang telah mengasihiku dengan kesucian hati.

Ibuku, sebagai ungkapan rasa yang tidak bisa diucapkan.

Kakak – kakakku yang sudah ikut berproses dalam hidupku.

Almamaterku yang sudah bersedia menampung keinginanku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa di Surga atas kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul *Persepsi Akuntan yang Bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik* ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. FA. Joko Siswanto, M.M.,Akt., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan bijaksana membimbing dan membantu penulis dengan memberikan masukan, saran, dan semangat selama penulisan skripsi.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan membantu penulis dengan memberikan masukan, saran, dan semangat selama penulisan skripsi.
5. M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt. yang telah membimbing dengan memberi saran dan masukan penulis dalam penulisan skripsi.

6. Sekretariat IAI-KAP Yogyakarta dan Akuntan yang bekerja pada KAP yang telah membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
7. Ayah dan Ibuku tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan.
8. Kakak-kakakku yang telah mengajarkan kedewasaan diri dalam hidup, berproses bersama dan semua bantuannya.
9. Dek Marcel yang selalu membuat senyuman dalam diriku dan keluarga.
10. Sahabatku Alm. Tian, Agung, Trimbil, Antok, Agung Solo, Hendro, Oky, Hugo, Heru, Sigit, Heri, Hari Goceng yang telah berjuang bersama selama ini.
11. Betet, Agung Eternity, Boim, Heri Tattoo, Dolog, Anik, Sinta, Adis, Tophan dan Icha, Z'tro 69, Alberth, Andika, Simbah, Koko.
12. Tyas, Elis, Devi, Riri, Susi, Dini, Fetri, Ritha atas kebersamaannya.
13. Untuk yang selalu membuatku tetap semangat hidup.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu Penulis membuka diri terhadap masukan, kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua.

Yogyakarta, 29 Desember 2006

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada perusahaan besar atau perusahaan *go public* terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Manajemen adalah pihak yang mengelola dan mengendalikan perusahaan yang telah mendapat wewenang atas sumber daya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik perusahaan. Manajemen harus merancang suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan tersebut harus dapat diandalkan dan manajemen harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut kepada pemilik secara periodik. Laporan keuangan tersebut dapat dipakai sebagai penilaian terhadap kondisi perusahaan oleh pemilik ataupun pihak lain yang memerlukan informasi tersebut. Pihak lain tersebut antara lain adalah kreditor, calon kreditor atau investor, pemerintah, analis keuangan dan sebagainya.

Manajemen berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan bisnis perusahaan yang dipercayakan kepadanya, sedangkan pemakai laporan keuangan, khususnya pemilik berkepentingan untuk melihat hasil kerja manajemen di dalam mengelola perusahaan. Dari uraian diatas, dapat diketahui adanya sebuah kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan ataupun pemilik. Karena ada perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporan

keuangan maka laporan keuangan harus dapat dibuktikan kebenarannya. Pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan adalah akuntan publik dan akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik.

Oleh karena itu, para pemakai laporan keuangan dan manajemen menaruh kepercayaan yang besar kepada akuntan publik dan akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik, yang mengharuskan akuntan memperhatikan independensi pemeriksaannya. Independensi akuntan merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan mencakup dua aspek: (1) independensi dalam kenyataan, (2) independensi penampilan. Independensi dalam kenyataan berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan untuk merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan bertindak independen. Sehingga akuntan harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensi profesinya.

Independensi dalam kenyataan sulit diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakat cenderung untuk menilai independensi penampilan akuntan dari pada independensi dalam kenyataan. Rusaknya independensi penampilan suatu Kantor Akuntan Publik tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tetapi juga merusak kepercayaan terhadap profesi akuntan publik maupun akuntan yang bekerja pada Kantor

Akuntan Publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Persepsi Akuntan yang Bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik.”**

Rumusan Masalah

Bagaimanakah persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik di Yogyakarta?

Apakah faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik?

Batasan Masalah

Menurut Supriyono (1998: 3), faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi: hubungan keuangan, jasa-jasa lainnya selain audit, lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, persaingan antar akuntan publik, ukuran Kantor Akuntan Publik, dan *fee* audit. Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (1993: 84), faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi: hubungan keuangan, ketentuan pinjaman yang normal, tuntutan antara klien dan Kantor Akuntan Publik, jasa-jasa lainnya selain audit, ketergantungan pada satu klien, dan perikatan kerja dan pembayaran biaya audit oleh manajemen.

Dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian maka peneliti membatasi dengan empat faktor yang mempengaruhi independensi akuntan

publik. Faktor tersebut meliputi: hubungan keuangan, tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien, jasa-jasa lainnya selain audit, dan *fee* audit.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik tempat mereka bekerja sebagai bentuk evaluasi serta usaha meningkatkan kinerja mereka, sehubungan dengan pentingnya independensi pemeriksaan auditor.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian lain yang serupa dan mampu membuka wawasan tentang independensi pemeriksaan akuntan publik terutama bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat memperdalam dan menerapkan ilmu dan teori yang didapat selama kuliah di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi terutama dalam bidang auditing.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian yang meliputi: Pengertian Independen, Auditor Independen, Penunjukan Audit Independen, Membangun Pemahaman Dengan Klien, Tanggung Jawab Auditor Independen, Pelaporan Apabila Akuntan Publik Tidak Independen, Komite Audit

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian, yakni jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengujian instrumen, dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Kantor Akuntan Publik

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pengolahan data, presentasi hasil dan pembahasannya.

BAB VI : Penutup

Mengemukakan tentang kesimpulan yang dilandasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Independen

Independen sangat penting bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga. Agar pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya, auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurut Kosasih, Ruchyat (dalam Auditing Prinsip dan Prosedur, 1982: 80), menyatakan bahwa:

Independen harus diartikan sebagai bebas dari bujukan, pengaruh atau pengendalian dari pihak klien (pimpinan perusahaan yang diperiksanya). Sikap independen berarti mampu bertindak jujur dan objektif, baik dalam kenyataan (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

Menurut IAI, yang merupakan Ikatan Akuntan Publik di Indonesia, menjelaskan bahwa independen harus dipertahankan oleh akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta/kenyataan (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Definisi independensi menurut IAI SA Seksi 200 mengatakan bahwa tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan memberikan pendapatnya. Independensi dalam hal ini tidak berarti

seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Akuntan publik dalam hal mengakui kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon pemilik dan kreditur.

Menurut IAI kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap akuntan publik sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap akuntan publik ternyata berkurang bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berpikir sehat dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, akuntan publik harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, baik itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sebagai contoh, seorang akuntan publik yang mengaudit suatu perusahaan dan ia juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun ia telah menggunakan keahliannya dengan jujur, namun sangat sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai seorang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh akuntan publik selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi. Akuntan publik tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya.

Dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Supriyono (1988: 19) mengutip pendapat Wilcox mengenai independensi sebagai berikut:

Independensi adalah salah satu norma pemeriksaan akuntan yang penting sebab pendapat akuntan independen diberikan untuk tujuan menambah kredibilitas laporan keuangan yang pada dasarnya merupakan gambaran manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap manajemen kliennya, pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti.

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Menurut Mulyadi (1998: 27) mendefinisikan independen adalah:

Adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Sedangkan Arens Alvin. A., memberikan definisi tentang independensi dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan menitikberatkan pada pandangan tidak memihak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh lembaga yang telah disahkan. Arens dan Loebbecke juga menjelaskan bahwa independensi dalam kenyataan timbul jika pada kenyataannya akuntan publik mampu mempertahankan sikap tidak memihak selama pelaksanaan pemeriksaannya. Sedangkan independensi dalam penampilan tergantung penafsiran pihak lain terhadap independensi akuntan publik tersebut. Akuntan publik dalam praktek publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesinya seperti

yang disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan yang berwenang.

Atas dasar uraian mengenai definisi independensi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pengertian independensi akuntan publik sebagai berikut:

1. Independen berarti bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan pengauditan laporan keuangan.
2. Sikap independen auditor juga harus dapat mempertahankan sikap independen kenyataan dan sikap independen penampilan.
3. Jika akuntan publik tidak independen dalam pelaporan terhadap kliennya, maka laporan yang dia berikan itu tidak mempunyai arti.
4. Independensi dalam praktek publik telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan harus dilaksanakan oleh akuntan dalam pemeriksaan laporan keuangan.
5. Kemampuan akuntan publik meningkatkan kredibilitas pernyataan terhadap laporan keuangan yang diperiksa.
6. Sikap independen auditor merupakan tindakan yang jujur, tidak memihak, dan bebas dari prasangka.

B. Auditor Independen

Auditor independen atau disebut akuntan publik, melakukan tanggung jawabnya mengaudit atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang harus diaudit laporan keuangannya dan kalangan bisnis serta banyak pihak lainnya semakin mengenal laporan ini, maka

masyarakat sering mengartikan istilah auditor sama dengan akuntan publik, padahal terdapat beberapa jenis auditor yang berbeda-beda fungsi dan pekerjaannya. Auditor independen menurut Mulyadi (1998: 27) mendefinisikan sebagai berikut:

Auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, pasal 12 menjelaskan bahwa seorang akuntan publik harus mempertahankan independensinya. Seorang akuntan publik dalam pelaksanaan fungsi pelaporan pemeriksaan, akuntan haruslah bebas dari setiap kepentingan yang dapat menyebabkan penyimpangan dari independensi dan obyektifitas, sehingga ia senantiasa dalam posisi yang memungkinkan untuk dapat menyatakan pendapat akuntan tanpa terikat suatu kepentingan, seperti yang tercantum dalam pasal 13 Kode Etik Akuntan Indonesia.

Praktek sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mendapatkan ijin dari Departemen Keuangan. Seperti yang telah dijelaskan IAI dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Sedangkan Jusup, Haryono (2000: 19) menyebutkan bahwa:

Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.

Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter yang sangat penting untuk profesi akuntan publik di dalam melaksanakan pemeriksaan audit terhadap kliennya. Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan kepentingan pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Pendapat akuntan publik mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan tidak mempunyai nilai kecuali jika akuntan tersebut benar-benar independen. Dalam hal ini akuntan publik mempunyai kewajiban profesional yang sangat besar terhadap para pemakai laporan keuangan, meskipun akuntan publik tersebut tidak mengetahui siapa sebenarnya para pemakai laporan keuangan.

C. Penunjukan Auditor Independen

Menurut IAI, pertimbangan atas standar pekerjaan lapangan pertama dalam standar auditing memicu kesadaran untuk menunjuk auditor independen secara dini. Langkah ini akan memberikan banyak manfaat bagi auditor maupun klien. Penunjukan auditor independen secara dini, memungkinkan auditor untuk merencanakan pekerjaannya sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut dapat

dilaksanakan dengan cepat dan efisien serta dapat menentukan seberapa jauh pekerjaan tersebut dilaksanakan.

IAI juga menyebutkan walaupun penunjukan dini lebih baik, auditor independen dapat menerima perikatan pada saat mendekati atau setelah tanggal neraca. Untuk itu, sebelum menerima perikatan, auditor harus yakin apakah kondisi seperti itu memungkinkan dia untuk melaksanakan audit secara memadai dan memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika kondisi tersebut tidak memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, ia mesti membahas dengan klien tentang kemungkinan ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat. Kadang-kadang keterbatasan audit yang timbul sebagai akibat kondisi di atas dapat diatasi. Sebagai contoh, penghitungan fisik sediaan dapat ditunda atau dilakukan kembali di bawah pengamatan auditor independen.

D. Membangun Pemahaman dengan Klien.

IAI menjelaskan bahwa auditor harus membangun pemahaman dengan klien tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan. Pemahaman tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain, baik di pihak auditor maupun klien.

Pemahaman dengan klien tentang audit atas laporan keuangan umumnya mencakup hal-hal berikut ini:

1. Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan.

2. Manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan pengendalian intern yang efektif terhadap pelaporan keuangan.
3. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terhadap aktivitasnya.
4. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan tersedia bagi auditor.
5. Pada akhir perikatan, manajemen akan menyediakan suatu surat bagi auditor yang menegaskan representasi tertentu yang dibuat selama audit berlangsung.
6. Auditor bertanggung jawab untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
7. Suatu audit mencakup pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern yang cukup untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang harus dilaksanakan.

Pemahaman dengan klien juga mencakup hal-hal lain seperti berikut ini:

1. Pengaturan mengenai pelaksanaan perikatan (sebagai contoh, waktu, bantuan klien berkaitan dengan pembuatan skedul, dan penyediaan dokumen).
2. Pengaturan tentang keikutsertaan spesialis atau auditor intern, jika diperlukan.
3. Pengaturan tentang keikutsertaan auditor pendahulu.
4. Pengaturan tentang *fee* dan penagihan.
5. Adanya pembatasan atau pengaturan lain tentang kewajiban auditor atau klien, seperti ganti rugi kepada auditor untuk kewajiban yang timbul dari representasi salah yang dilakukan dengan sepengetahuan manajemen kepada auditor.

6. Kondisi yang memungkinkan pihak lain diperbolehkan untuk melakukan akses ke kertas kerja auditor.
7. Jasa tambahan yang disediakan oleh auditor berkaitan dengan pemenuhan persyaratan badan pengatur.
8. Pengaturan tentang jasa lain yang harus disediakan oleh auditor dalam hubungannya dengan perikatan.

E. Tanggung Jawab Auditor Independen

Auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, IAI telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis yang mencakup Aturan Etika Departemen Akuntan Publik.

Dalam standar umum kedua, independensi dalam sikap mental seorang auditor harus dipertahankan. Karena kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur.

F. Pelaporan Apabila Akuntan Publik Tidak Independen

Seorang akuntan publik mungkin mengaudit laporan keuangan dalam posisi tidak independen terhadap klien. Sebagai contoh, akuntan publik memiliki hubungan keuangan dengan perusahaan atau klien. Apabila akuntan publik berkedudukan tidak independen sebagaimana diharuskan oleh standar auditing, maka akuntan publik tersebut tidak diperbolehkan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian, melainkan harus mengeluarkan pernyataan tidak memberi pendapat.

Oleh karenanya, sebelum menerima klien audit baru, Kantor Akuntan Publik harus melakukan evaluasi apakah ada hal-hal yang dapat mengganggu independensinya terhadap klien. Salah satu prosedur yang lazim ditempuh adalah mengirim surat edaran kepada semua staf profesional Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dengan menyebutkan nama calon klien, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubungan keuangan atau bisnis dengan calon klien tersebut. Apabila disimpulkan bahwa persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi, maka penugasan harus ditolak atau calon klien harus diberi pendapat “menolak memberi pendapat”, seperti telah dijelaskan diatas.

Meskipun dapat diambil tindakan yang tegas untuk mengeliminasi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik agar mendapatkan respek masyarakat, belum dapat dipastikan bahwa cara itu dapat mengatasi persoalan yang ada. Oleh sebab itu, untuk memeriksa beberapa hal

yang mempengaruhi independensi, ada baiknya melakukan pertimbangan apa yang dilakukan profesi untuk melakukannya.

1. Hubungan Keuangan

AICPA dalam peraturan 101 yang dikutip oleh Arens Alvin. A., melarang akuntan publik untuk memiliki saham atau investasi langsung lainnya dari klien auditnya karena itu akan mengganggu independensi dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai laporan audit terhadap independensi auditor. Investasi tidak langsung juga dilarang dalam peraturan ini, misalnya apabila kakek dari auditor memiliki saham dalam perusahaan klien, tetapi hanya jika jumlahnya material bagi auditor (Amir Abadi Jusup, 1993 : 83).

Ada berbagai aspek hubungan keuangan antara karyawan Kantor Akuntan Publik dengan klien-kliennya:

a. Mantan praktisi

Pemegang saham yang keluar dari Kantor Akuntan Publik karena hal-hal seperti pengunduran diri atau menjual hak kepemilikannya untuk mengadakan hubungan dengan klien kantor tersebut yang dalam keadaan normal merupakan pelanggaran tanpa mempengaruhi independensi kantor akuntan. Pelanggaran independensi terjadi bila mantan partner ikut dalam kegiatan dalam kantor akuntan.

b. Prosedur peminjaman yang normal

Pinjaman antara sebuah Kantor Akuntan Publik dengan klien yang diauditnya dilarang sebab hal itu merupakan hubungan keuangan dan dapat mempengaruhi independensi akuntan publik untuk bertindak. Ada beberapa hal yang tidak mengganggu independensi akuntan publik, yaitu pinjaman yang jumlahnya kecil, hipotek rumah, dan sebagian besar pinjaman tanpa jaminan. Pengecualian ini harus dilakukan menurut prosedur peminjaman, jangka waktu dan persyaratan yang lazim. Pembatasan dan pengecualian atas pinjaman tersebut merupakan hal yang penting, karena mempertimbangkan perimbangan antara independensi dan kebutuhan para akuntan publik untuk bertindak sebagai orang bisnis dan orang pribadi.

c. Kepentingan keuangan pada hubungan saudara

Apabila saudara dari partner sebuah Kantor Akuntan Publik memiliki hubungan keuangan dengan perusahaan klien yang diaudit, merupakan pelanggaran dalam hal mempengaruhi independensi.

d. Hubungan investor atau investee bersama dengan klien

Partner Kantor Akuntan Publik memiliki saham pada suatu klien yang tidak diauditnya tetapi klien partner yang akan diaudit memiliki saham pada perusahaan partner.

e. Direktur, officer, manajemen atau karyawan perusahaan

Jika seorang akuntan publik menjadi anggota dewan direksi atau pengurus perusahaan klien, kemampuannya dalam mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan klien akan terpengaruh. Meskipun posisi ini

tidak mempengaruhi independensi auditor, hubungan yang dekat dengan pihak manajemen akan mempengaruhi independensi akuntan publik dalam hal mengevaluasi penyajian laporan keuangan oleh pemakai. Tetapi akuntan publik diijinkan untuk melaksanakan audit dan sekaligus menjadi direktur bagi organisasi-organisasi nirlaba, seperti organisasi sosial dan agama, sepanjang profesinya semata-mata bersifat kehormatan. Sebagai contoh, hal biasa bagi seorang partner Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas Lembaga Sosial Masyarakat, sekaligus menjadi direktur kehormatan, bersama-sama dengan pemuka sosial lainnya. Akuntan publik tersebut tidak dapat memberi suara atau partisipasi dalam fungsi manajemen.

2. Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan Klien

Jika terdapat tuntutan hukum atau maksud untuk mengadakan tuntutan hukum antara sebuah kantor akuntan publik dan klien, maka kemampuan akuntan publik tersebut dan kliennya untuk tetap obyektif diragukan. Misalnya, apabila pihak manajemen menuntut sebuah Kantor Akuntan Publik dengan klaim kekurangan dalam audit sebelumnya, maka kantor akuntan publik tersebut dianggap tidak independen untuk audit tahun berjalan. Begitu pula, jika Kantor Akuntan Publik menuntut manajemen karena kecurangan atau penggelapan, independensi dianggap dapat terganggu.

Pertimbangan utama dalam semua tuntutan adalah kemungkinan pengaruh pada kemampuan klien, manajemen, kantor akuntan publik untuk tetap bersikap obyektif dan memberi pernyataan secara bebas.

3. Jasa-jasa Lainnya Selain Audit

Jika seorang akuntan publik mencatat transaksi-transaksi kliennya di dalam buku harian, membukukan total bulanannya ke dalam buku besar, membuat ayat jurnal penyesuaian dan kemudian menyelenggarakan audit, independensi akuntan publik ini belum dapat dipercaya.

a. Jasa akuntansi dan pembukuan

Banyak klien dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada Kantor Akuntan Publik. Banyak juga Kantor Akuntan Publik kecil yang bersedia melakukan tugas-tugas pembukuan guna memenuhi kebutuhan klien. Timbul dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh pemberian jasa akuntansi terhadap independensi akuntan publik. Pandangan yang pertama berpendapat bahwa pemberian jasa akuntansi akan merusak independensi akuntan publik. AICPA yang dikutip dalam bukunya Arens Alvin. A, menolak pemberian jasa akuntansi dalam interpretasi peraturan 101. Pandangan yang kedua, bahwa pemberian jasa akuntansi dapat dipertahankan akuntan publik dengan memenuhi syarat-syarat (Supriyono, 1998 : 44) :

- (1) Akuntan publik yang bersangkutan tidak boleh mempunyai suatu hubungan atau kombinasi hubungan dengan klien atau konflik kepentingan tertentu yang dapat merusak independensi.
- (2) Klien harus menerima tanggung jawab atas laporan keuangan sebagai miliknya sendiri. Klien harus cukup mengetahui kegiatan dan kondisi keuangannya dan prinsip-prinsip akuntansi yang

digunakan sehingga dia dapat menerima tanggung jawab tersebut dengan baik, termasuk secara kewajaran penilaian dan penyajian serta kecukupan pengungkapan. Jika perlu akuntan publik harus mendiskusikan persoalan-persoalan akuntansi dengan kliennya untuk meyakinkan bahwa klien memiliki syarat-syarat tingkat pengetahuan yang diperlukan.

(3) Akuntan publik yang bersangkutan tidak dibenarkan berperan sebagai karyawan atau manajemen yang menjalankan operasi perusahaan. Sebagai contoh, akuntan publik tidak boleh melakukan transaksi-transaksi, atau menjalankan wewenang atas nama klien.

(4) Akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disusun dari catatan dan buku klien yang dibuat oleh akuntan publik harus sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan yang diterima umum.

b. Jasa konsultasi manajemen

Sebagian besar Kantor Akuntan Publik memberikan jasa tertentu yang memberi kemungkinan pada kliennya untuk meningkatkan efektifitas operasinya. Jasa ini mencakup mulai dari pemberian rekomendasi sederhana mengenai pembenahan system akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, pemanfaatan instalasi komputer.

c. Jasa perpajakan

Kantor Akuntan Publik menyusun surat pemberitahuan pajak (SPT), pajak penghasilan dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan klien audit maupun yang bukan. Disamping itu, Kantor Akuntan Publik juga mengurus pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak pertambahan nilai (PPN), perencanaan perpajakan, dan jasa perpajakan lainnya.

4. *Fee* Audit

Independensi dalam kenyataan dan independensi dalam penampilan suatu Kantor Akuntan Publik perlu diragukan jika *fee* audit yang diterima dari satu klien merupakan bagian yang signifikan dari total pendapatan Kantor Akuntan Publik tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat bahwa *fee* audit yang besar dapat mengurangi independensi, karena didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut (Supriyono, 1998 : 59) :

- a) Kantor Akuntan Publik yang menerima *fee* audit besar merasa tergantung pada klien tersebut sehingga segan menentang pendapat klien, meskipun pendapat klien tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau mengakibatkan akuntan pemeriksa tidak melaksanakan norma pemeriksaan akuntan secukupnya.
- b) Kantor akuntan yang menerima *fee* audit besar dari klien, akan merasa takut kehilangan klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannya.

Akan tetapi, *fee* audit yang besar kemungkinan dapat mendorong Kantor Akuntan Publik lebih independen karena dapat melakukan penelitian dan penerapan prosedur audit yang lebih luas dan seksama.

Fee audit yang kecil kemungkinan dapat mengakibatkan suatu Kantor Akuntan Publik lebih independen karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Kantor akuntan tidak merasa tergantung pada klien, sehingga lebih berani menentang kehendak klien yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau norma pemeriksaan akuntan.
- b) Hilangnya klien yang memberikan *fee* audit kecil, tidak akan mengakibatkan turunnya pendapatan Kantor Akuntan Publik dalam jumlah yang relatif besar.

Akan tetapi, *fee* audit yang kecil dapat mengakibatkan akuntan publik tidak independen karena waktu dan biaya audit yang terbatas untuk melakukan penelitian.

IAI menyebutkan bahwa besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota Kantor Akuntan Publik tidak diperkenankan mendapat klien dengan cara menawarkan *fee* audit yang dapat merusak citra profesi. Pasal 20 Kode Etik Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa seorang akuntan publik berhak untuk menerima honorarium untuk kemahiran pengetahuan yang dia berikan kepada pekerjaan profesionalnya. Dalam

menetapkan honorarium yang wajar, maka tanggung jawab yang terlibat, sifat, batasan dan pentingnya pekerjaan yang ia lakukan patut diperhitungkan. Namun ia dilarang untuk menerima keuntungan lainnya selain daripada pembayaran honorarium yang patut, demikian pula jumlah honorarium tersebut tidak boleh tergantung kepada manfaat yang akan diperoleh kliennya.

Independensi seorang akuntan publik dapat dipertanyakan bila penugasan dan pembayaran honorarium auditor ditanggung oleh manajemen. Untuk itu, alangkah baiknya bila perusahaan membentuk komite audit.

G. Komite audit

Komite audit adalah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu akuntan publik dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Suatu komite audit memutuskan hal-hal seperti Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan dan ruang lingkup pelayanan yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut. Pertemuan secara periodik dengan Kantor Akuntan Publik untuk membicarakan perkembangan, hasil audit dan membantu menengahi perselisihan yang timbul di antara Kantor Akuntan Publik dengan klien.

Menurut Supriyono (1998: 54) komite audit tidak hanya diharapkan dapat mengatasi rusaknya independensi karena hubungan audit yang lama antara satu Kantor Akuntan Publik dengan satu klien tertentu namun juga diharapkan dapat mengatasi kurangnya independensi karena faktor-faktor lainnya. Atas dasar uraian di

atas tampak bahwa komite audit mempunyai banya manfaat dan diterima keberadaanya oleh berbagai pihak.

Perusahaan juga dapat meminta para pemegang saham untuk mengesahkan pemilihan sebuah Kantor Akuntan Publik baru atau meneruskan yang sudah ada. Para pemegang saham dapat bertindak lebih obyektif dibandingkan dengan pihak manajemen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap obyek tertentu sehingga kesimpulan diambil hanya berlaku untuk tempat yang diteliti. Tempat yang diteliti oleh peneliti adalah empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Obyek dalam penelitian ini adalah persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik.

C. Data yang Dicari

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah

1. Gambaran KAP secara umum.
2. Deskripsi independensi pemeriksaan akuntan publik menurut kajian teori.
3. Persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik dan faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik, yang berupa kuesioner terisi.
4. Data dan informasi lain yang menunjang penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden (Margono, 2000: 167). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berstruktur. Kuesioner ini disebut juga kuesioner tertutup, berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang disediakan (Margono, 2000: 168).

Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasar penelitian yang dilakukan oleh Supriyono (1988). Daftar kuesioner yang diedarkan meliputi:

- a. Identitas responden berisi 4 pertanyaan.
- b. Hubungan keuangan yang terdiri 8 pertanyaan. Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien 3 pertanyaan. Jasa-jasa lainnya selain audit 4 pertanyaan. *Fee* audit 7 pertanyaan dan independensi pemeriksaan Akuntan Publik 4 pertanyaan.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku-buku, artikel dan jurnal mengenai independensi pemeriksaan akuntan publik untuk memperoleh landasan teori dalam menganalisis situasi yang ada di lapangan.

E. Variabel Penelitian

Pengukuran variabel dalam penyusunan kuesioner yang digunakan oleh peneliti ini terdiri atas variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah hubungan keuangan, tuntutan antara Kantor Akuntan

Publik dengan klien, jasa-jasa lainnya selain audit, dan *fee* audit, sedangkan variabel dependennya adalah independensi pemeriksaan akuntan publik.

Jawaban responden dari kuesioner selanjutnya dinyatakan dengan alternatif jawaban yang menggunakan skala *Likert* 1-5, yaitu:

Tabel III.1
Skor Penilaian Kuesioner

Alternatif	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu- ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Umar, 2001: 89)

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan:

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Sedangkan jumlah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta menurut sekretariat IAI-KAP cabang Yogyakarta berjumlah 59 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil harus bisa mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang berarti pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria-kriteria tersebut antara lain: sampel adalah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik, empat Kantor Akuntan Publik yang diteliti, sampel hanya berlaku di daerah Yogyakarta dan biaya penelitian.

Untuk menetapkan jumlah sampel, peneliti menggunakan pendapat Gay (Umar, 2001: 75) yang menyatakan ukuran minimal sampel yang dapat diterima berdasarkan desain/metode penelitian yang digunakan adalah 10% dari populasi atau untuk populasi yang relatif kecil minimal 20% dari total populasi. Sehingga penelitian ini jumlah minimal sampel adalah :

$$n = 20\% \times N$$

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

Besarnya sampel :

$$n = 20\% \times \text{jumlah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta}$$

$$n = 20\% \times 59$$

$$n = 11,8 \text{ atau disamakan dengan } 12$$

Jadi jumlah minimal sampel sebanyak 12 responden. Dalam penelitian ini 18 responden yang bersedia, maka sampel telah memenuhi batas minimal jumlah sampel

G. Teknik Pengujian Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, maka untuk mengukur kevalidan dan keandalannya dilakukan pengujian terlebih dahulu. Adapun teknik pengujian tersebut meliputi:

1. Analisis Validitas

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2002: 173). Untuk mengukur kevalidan kuesioner yang dibagikan kepada responden, digunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson (Hadi, 1991: 14), yaitu:

$$r_{XY} = \frac{N \sum XY - (\sum x)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

rx_y = Koefisien korelasi setiap item

X = Nilai dari setiap item

Y = Nilai total semua item

N = Banyaknya sampel

Besarnya r_{xy} dapat dihitung dengan menggunakan korelasi dengan taraf signifikan (α) = 5%. Jika r_{xy} lebih besar dari r tabel maka kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur dapat dikatakan valid.

2. Analisis Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat kestabilan dan keandalan alat ukur dalam mengukur gejala. Tujuan analisis reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana pengukuran data dapat memberikan hasil relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama atau dengan kata lain untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara sesuatu yang diukur dan jenis alat pengukur yang dipakai. Pengukuran ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Hadi, 1991: 44), yaitu:

$$r_{XY} = \frac{N \sum XY - (\sum x)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi setiap item

X = Nilai item bernomor ganjil

Y = Nilai item bernomor genap

N = Banyaknya sampel

Setelah koefisien korelasi item bernomor ganjil dan bernomor genap didapat maka untuk menilai reliabilitas digunakan rumus Spearman Brown (Hadi, 1991: 44):

$$r_{xx} = \frac{2 r_{xy}}{1 + r_{xy}}$$

$$1+r_{xy}$$

Keterangan:

r_{xx} = Koefisien reliabilitas

r_{xy} = Koefisien korelasi antara item bernomor ganjil dengan item bernomor genap.

Dengan taraf signifikan (α) = 5%, apabila r_{xx} lebih besar dari r tabel maka kuesioner sebagai alat ukur dapat dikatakan memenuhi syarat reliabilitas.

H. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data diperlukan untuk menentukan alat uji hipotesis yang akan digunakan, apakah hasil pengujian menunjukkan data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, apabila hasil pengujian menunjukkan distribusi normal maka hipotesis akan diuji dengan statistik parametik, namun jika hasil pengujian menunjukkan data tidak berdistribusi normal maka alat uji hipotesisnya berupa data statistik non parametik.

Pengujian ini dibuktikan dengan pengujian satu sample *Kolmogorov Smirnov* dua sisi yaitu dengan membandingkan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) dan probabilitas, apabila hasil penelitian menunjukkan probabilitas > taraf signifikansi, maka sebaran data penelitian adalah normal. Sebaliknya jika probabilitas < taraf signifikansi, maka sebaran data adalah tidak normal.

I. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama:

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan tabulasi data dengan cara melakukan perhitungan jawaban kuesioner dari responden yang telah mengisinya. Dari data yang ada ditentukan nilai terendah dan tertinggi dan kemudian dicari jumlah kategori jawaban.

$$\begin{aligned} Range &= \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{terendah}}{\sum \text{kategori}} \\ &= \frac{20 - 4}{5} \\ &= \frac{16}{5} \\ &= 3,2 \end{aligned}$$

Maka skor penilaian di kelompokkan sebagai berikut:

4 – 7,1 = Sangat tidak setuju

7,2 – 10,3 = Tidak setuju

10,4 – 13,5 = Ragu-ragu

13,6 – 16,7 = Setuju

16,8 – 20 = Sangat setuju.

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua:
 - a. Mendapatkan data skor dari kuesioner yang diperoleh dari sampel yang telah dipilih. Setelah data skor dari kuesioner diperoleh maka disusun dalam tabulasi berdasarkan variabel yang yang telah dipilih. Tabulasi

tersebut dibuat satu persatu untuk setiap variabel bebas. Contoh tabulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Responden	1	2	3	ke-n	jumlah
1					
2					
3					
.....					

Setelah mendapat jumlah skor untuk masing-masing variabel maka variabel beserta jumlah skor untuk masing-masing variabel disusun dalam bentuk sebagai berikut:

responden	Variabel Y	Variabel X ₁	Variabel X ₂	Variabel X ₃	Variabel X ₄
1					
2					
3					
.....					

Setelah memperoleh tabulasi diatas maka jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam program SPSS untuk diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi berganda.

b. Memasukkannya ke dalam rumus Regresi Berganda

Persamaan umum untuk regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

Dimana:

Y = Variabel dependen

X₁, X₂, X₃, X₄, ..., X_n = Variabel independen

a = konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, ..., b_n = koefisien regresi

Dalam penelitian ini:

Y = Independensi pemeriksaan akuntan publik

X₁ = Hubungan keuangan

X₂ = Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien

X₃ = Jasa-jasa lainnya selain audit

X₄ = *Fee* audit

c. Uji hipotesis koefisien regresi

1) Uji koefisien regresi secara serempak atau uji F

Selain perlu menguji apakah masing-masing variabel independen satu persatu secara statistik signifikan atau tidak dalam mempengaruhi variabel dependen. Diperlukan juga uji statistik untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk pengujian itu, maka digunakan rumus:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / k}{(1-R^2) / (n-k-1)}$$

Keterangan:

R² = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Dengan penggunaan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$ artinya variabel hubungan keuangan, tuntutan antara Kantor Akuntan Publik, jasa- jasa lainnya selain audit, *fee* audit tidak berpengaruh pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

$H_1 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 \neq 0$ artinya variabel hubungan keuangan, tuntutan antara Kantor Akuntan Publik, jasa- jasa lainnya selain audit, *fee* audit berpengaruh pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Dengan kriteria penerimaan dan penolakan Hipotesis adalah:

Ho ditolak jika: $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau signifikan $< \alpha (0,05)$

Ho diterima jika: $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau signifikan $> \alpha (0,05)$

Dengan $df_1 = k$ dan $df_2 = n - k - 1$

2) Uji koefisien regresi secara parsial uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh keterdalaman masing-masing koefisien regresi dan dapat juga diartikan sebagai pengujian signifikan tidaknya pengaruh variabel X_1 terhadap Y , X_2 terhadap Y , X_3 terhadap Y , X_4 terhadap Y . Dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b}{Se}$$

Keterangan:

t_{hitung} = Nilai t

b = Nilai koefisien regresi

Se = Standar error

Dengan penggunaan hipotesis sebagai berikut:

Ho : $b_1 = 0$ artinya tidak ada pengaruh hubungan keuangan pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

H1 : $b_1 \neq 0$ artinya ada pengaruh hubungan keuangan pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Ho : $b_2 = 0$ artinya tidak ada pengaruh tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

H1 : $b_2 \neq 0$ artinya ada pengaruh tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Ho : $b_3 = 0$ artinya tidak ada pengaruh jasa- jasa lainnya selain audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

H1 : $b_3 \neq 0$ artinya ada pengaruh jasa- jasa lainnya selain audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Ho : $b_4 = 0$ artinya tidak ada pengaruh *fee* audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

H1 : $b_4 \neq 0$ artinya ada pengaruh *fee* audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Adapun kriteria penerimaan dan penolakan Hipotesis adalah:

Ho ditolak jika: $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$,

atau Signifikan $< \alpha$ (0,05)

Ho diterima jika: $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$,

atau Signifikan $> \alpha$ (0,05)

Dengan $df = n - k - 1$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas. Dengan $\alpha = 5\%$ dan $d.f = n - k - 1$ maka titik kritis dapat ditentukan menggunakan t tabel dengan $t(\alpha / 2, d.f)$.

- 3) Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik dilihat dari koefisien regresi dari persamaan regresi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

A. Gambaran Umum Kantor Akuntan Publik

1. Kantor Akuntan Publik

Akuntan publik atau yang lebih dikenal dengan auditor adalah akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktek akuntan publik. Dalam menjalankan praktek akuntan publik, auditor bekerja dalam sebuah tim audit pada sebuah Kantor Akuntan Publik. Menurut Jusup, Haryono (2000: 100), Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik. Menurut wilayah operasinya, Kantor Akuntan Publik digolongkan menjadi empat, yaitu:

Kantor Akuntan besar internasional

Kantor Akuntan besar nasional

Kantor Akuntan besar regional dan lokal

Kantor Akuntan kecil lokal

Menurut data yang diperoleh lewat internet, saat ini ada empat buah Kantor Akuntan Publik besar internasional. Keempat Kantor Akuntan Publik yang sering disebut The Big Four tersebut, yaitu: DeloitteTouche Tohmatsu, Ernst & Young, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Int., dan Price Water House Coopers. Kantor-kantor Akuntan Publik tersebut biasanya

berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik di seluruh dunia dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan auditnya.

2. Kantor Akuntan Publik di Indonesia

Bentuk usaha Kantor Akuntan Publik di Indonesia ada dua macam (Jusup, Haryono, 2000: 20), yaitu:

- a. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk usaha sendiri.
- b. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk Usaha Kerjasama.

Jumlah Kantor Akuntan Publik di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pertambahan kuantitas tersebut terjadi seiring dengan perkembangan bisnis yang menuntut adanya audit terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Kantor Akuntan Publik yang terdaftar menunjukkan sedikitnya ada 193 Kantor Akuntan Publik. Jumlah tersebut tentu saja bukan jumlah yang sebenarnya, karena masih banyak Kantor Akuntan Publik yang tidak terdaftar di IAI. Kantor Akuntan Publik besar di Indonesia biasanya menjalin kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik asing, seperti Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim yang berkerjasama dengan salah satu dari The Big Four, Deloitte Touche Tohmatsu dan Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sanjaya yang bekerjasama dengan Ernst & Young. Selain bekerjasama dengan salah satu dari The Big Four, adapula Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik selain The Big Four, seperti: Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing HLB Internasional.

Sedangkan Kantor Akuntan Publik yang tarafnya lebih kecil jumlahnya cukup banyak dengan operasi yang terbatas.

3. Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta

Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia merupakan wilayah potensial bagi perkembangan Kantor Akuntan Publik dan profesi akuntan. Setidak-tidaknya tercatat sepuluh Kantor Akuntan Publik yang beroperasi. Data mengenai sepuluh Kantor Akuntan Publik yang berhasil dikumpulkan peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1
Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta

No	Nama KAP	Alamat
1	ABDUL MUNTHALIB	Jl. Soka No. 24 Banciro Baru
2	BAMBANG HARTADI	Jl. Ring Road Utara Jombor, Gedung Pusat UTY Lan. II
3	HADIONO	Jl. Kusbini No. 27
4	HLB. HADORI & REKAN	Jl. Wolter Monginsidi No. 19
5	HENRY SUSANTO	Jl. Gajah Mada No. 22
6	KUMALAHADI	Jl. Mayjen Sutoyo No. 79
7	SRI SUHARNI	Jl. Suroto No. 3 PAV, Kotabaru
8	PAMUDJI	Jl. Veteran No. 5
9	SOEROSO	Jl. Beo No. 49
10	SUHARTADI & REKAN	Jl. Perum Nogotirto I/ II Gamping

Sumber: www.iaiglobal.or.id

Sedang Kantor Akuntan Publik yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini adalah:

Tabel IV. 2
Kantor Akuntan Publik yang diteliti

No	Nama KAP	Alamat
1	ABDUL MUNTHALIB	Jl. Soka No. 24 Banciro Baru
2	HENRY SUSANTO	Jl. Gajah Mada No. 22
3	KUMALAHADI	Jl. Mayjen Sutoyo No. 79
4	SRI SUHARNI	Jl. Suroto No. 3 PAV, Kotabaru

Sumber: www.iaiglobal.or.id

4. Hirarki dalam Kantor Akuntan Publik

Struktur organisasi dalam Kantor Akuntan Publik, antara lain:

a. Partner

Bertugas mereview (menelaah pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya) serta bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.

b. Manajer

Staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, mereview lebih rinci pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee audit.

c. Akuntan Senior

Staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit dan mereview pekerjaan para akuntan junior.

d. Akuntan Junior

Staf pelaksanaan langsung yang bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Staf ini bertugas pada bagian-bagian pekerjaan audit dan berhak memberikan pendapat atas bagian yang diperiksanya.

B. Profesi Akuntan Publik

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis, kemajuan profesi akuntan publik semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan pihak independen dalam menilai kewajaran laporan keuangan semakin meningkat. Namun, tidak semua orang berhak memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan. Ada beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan untuk mendapatkan ijin membuka Kantor Akuntan Publik menurut Pasal 6 SK Menkeu No. 43/ 1997 menurut Jusup, Haryono (2000: 21) adalah sebagai berikut:

1. Berdomisili di wilayah Indonesia.
2. Memiliki register akuntan.
3. Menjadi anggota IAI.
4. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan IAI dengan gelar Bersertifikat Akuntan Publik.
5. Memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun dan lebih dari 3000 jam pengalaman audit umum dengan reputasi baik.
6. Telah menduduki jabatan manjer atau ketua tim audit umum sekurang-kurangnya satu tahun.
7. Wajib mempunyai KAP atau bekerja pada Koperasi Jasa Audit.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis data penelitian, yang merupakan hasil analisis data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dilakukan terhadap 18 responden akuntan yang bekerja di beberapa Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Independensi pemeriksaan akuntan publik sangat penting untuk dipertahankan oleh tiap akuntan publik karena independensi merupakan tanggung jawab tiap akuntan publik yang kemudian dilaksanakan melalui perannya dalam memberikan jasa profesional. Manfaat akan penelitian ini menjadi salah satu bentuk untuk memberikan masukan kepada akuntan publik maupun akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai bentuk evaluasi serta usaha untuk meningkatkan kinerja mereka. Berikut ini akan dilaporkan mengenai profil responden dan data yang diperoleh.

A. Deskriptif Responden

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan dalam lembar kuesioner dilampirkan tentang identitas dari responden untuk mengetahui umur, jabatan, lama bekerja dan pendidikan terakhir. Penulis menyajikan data mengenai identitas responden dalam tabel berikut ini:

Profil responden dilihat dari umur

Tabel V.1
Umur Responden

Umur	Jumlah	Prosentase (%)
22-25 tahun	8	44,44%
26-30 tahun	2	11,11%
Tidak menjawab	8	44,44%
Total	18	

Sumber: Data Responden

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 18 responden 44,44% atau 8 orang berumur antara 22-25 tahun, 11,11% atau 2 orang berumur antara 26-30 tahun dan sisanya sebanyak 44,44% atau 8 orang responden tidak menjawab.

Profil responden dilihat dari jabatan

Tabel V.2
Jabatan Responden

Jabatan	Jumlah	Prosentase (%)
Auditor Senior	7	38,89%
Auditor Junior	4	22,22%
Tidak Menjawab	7	38,89%
Total	18	

Sumber: Data Responden

Jabatan dari 18 responden pada penelitian ini diantaranya 38,89% atau 7 orang menjabat sebagai auditor senior, 22,22% atau 4 orang menjabat sebagai auditor junior dan 38,89% atau 7 orang responden tidak menjawab.

Profil responden dilihat dari lama bekerja

Tabel V. 3
Lama Bekerja Responden

Masa Kerja	Jumlah	Prosentase (%)
< 1 th	6	33,33%
1– 3 th	5	27,78%
> 3th	4	22,22%
Tidak Menjawab	3	16,67%
Total	18	

Sumber: Data Responden

Masa kerja dari 18 responden menunjukkan bahwa 33,33% atau 6 orang bertugas kurang dari satu tahun, 27,78% atau 5 orang bekerja selama antara 1-3 tahun, 22,22% atau 4 orang bekerja lebih dari tiga tahun dan sisanya sebanyak 16,67% atau 3 orang tidak menjawab.

4. Profil responden dilihat dari pendidikan terakhir

Tabel V. 4
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase (%)
S1	6	33,33%
Profesi Akuntan	1	5,56%
Tidak Menjawab	11	61,11%
Total	18	

Sumber: Data Responden

Dari data di atas menunjukkan pendidikan terakhir 18 responden adalah 6 orang atau 33,33% berpendidikan terakhir S1, 1 orang atau 5,56% berpendidikan terakhir profesi akuntan dan sisinya sebanyak 11 orang atau 61,11% tidak menjawab.

B. Uji Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Untuk mengetahui kualitas data dalam instrumen penelitian ini, maka dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas

1. Analisis Validitas

Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur maka semakin tepat pula alat pengukur tersebut mengenai sarannya.

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan teknik korelasi *Product Moment*, dengan taraf validitas suatu tes dinyatakan dalam suatu koefisien yang disebut koefisien validitas (r_{xy}). Setelah koefisien korelasi diperoleh, selanjutnya di uji dengan taraf signifikan 5%. Koefisien ini dinyatakan valid jika $r_{xy} > r_{tabel}$.

Instrumen dalam penelitian ini di bagi dalam 5 variabel, yaitu:

- a. Hubungan Keuangan
- b. Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan Klien
- c. Jasa-jasa Lainnya Selain Audit
- d. *Fee* Audit
- e. Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik

Untuk memperoleh data yang valid, maka hasil kuesioner dari 18 responden diuji validitasnya. Hasil uji validitas untuk semua variabel disajikan dalam tabel di bawah ini:

1. Hubungan Keuangan

Tabel V. 5
Uji Validitas Hubungan Keuangan

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	0,888	0,468	Valid
2.	0,546	0,468	Valid
3.	0,627	0,468	Valid
4.	0,844	0,468	Valid
5.	0,789	0,468	Valid
6.	0,772	0,468	Valid
7.	0,810	0,468	Valid
8.	0,864	0,468	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

2. Tuntutan diantara Kantor Akuntan Publik dengan Klien

Tabel V. 6
Uji Validitas Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik
dengan Klien

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
9.	0,801	0,468	Valid
10.	0,801	0,468	Valid
11.	0,722	0,468	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

3. Jasa-jasa Lainnya Selain Jasa Audit

Tabel V. 7
Uji Validitas Jasa-jasa Lainnya Selain Audit

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
12.	0,726	0,468	Valid
13.	0,695	0,468	Valid
14.	0,779	0,468	Valid
15.	0,862	0,468	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

4. Fee Audit

Tabel V. 8
Uji Validitas Fee Audit

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
16.	0,614	0,468	Valid
17.	0,542	0,468	Valid
18.	0,925	0,468	Valid
19.	0,879	0,468	Valid
20.	0,879	0,468	Valid
21.	0,857	0,468	Valid
22.	0,857	0,468	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

5. Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik

Tabel V. 9
Uji Validitas Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
23.	0,717	0,468	Valid
24.	0,716	0,468	Valid
25.	0,582	0,468	Valid
26.	0,805	0,468	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan penghitungan dengan program SPSS 12.0, diperoleh hasil bahwa $r_{xy} >$ dari r_{tabel} untuk setiap butir pertanyaan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam setiap variabel sudah memenuhi syarat untuk dikatakan valid, yaitu mempunyai nilai $r_{xy} > r_{tabel}$. Hal ini berarti semua butir pertanyaan dalam kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid, dengan demikian instrument tersebut dapat digunakan untuk tujuan penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Tujuan analisis reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana pengukuran data dapat memberikan hasil relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama atau dengan kata lain untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara sesuatu yang diukur dan jenis alat pengukur yang dipakai. Pengukuran ini menggunakan teknik korelasi *Product Momen* dari Pearson. Setelah koefisien korelasi item bernomor ganjil dan bernomor genap didapat dengan menggunakan korelasi Pearson maka untuk menilai reliabilitas digunakan rumus Spearman Brown. Dengan taraf signifikan (α) = 5%, apabila r_{xx} lebih besar dari r_{tabel} maka kuesioner sebagai alat ukur dapat dikatakan memenuhi syarat reliabilitas.

Hasil uji reabilitas untuk semua faktor disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel V. 10
Uji Reliabilitas

Variabel	r_{xx}	r tabel	Keterangan
Hubungan Keuangan	0,8463	0,468	Reliabel
Tuntutan diantara Kantor Akuntan Publik dengan klien	0,5968	0,468	Reliabel
Jasa-jasa lainnya selain jasa audit	0,5677	0,468	Reliabel
Fee audit	0,9194	0,468	Reliabel
Independensi pemeriksaan akuntan publik	0,5109	0,468	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam setiap variabel sudah memenuhi syarat untuk dikatakan reliabel, yaitu mempunyai nilai $r_{xx} >$

r_{tabel} .

C. Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan analisis data lebih lanjut dilakukan uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui apakah data sampel pada semua variabel yang terdiri dari 18 responden terdistribusi secara normal, dengan menggunakan *Level of significant* (α) 5%. Hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:

Ho : Data semua variabel terdistribusi secara normal

H1 : Data semua variabel tidak terdistribusi secara normal

Apabila hasil penelitian menunjukkan probabilitas (*Asimp. Sig(2-tailed)*) > *level of significant* maka sebaran data penelitian adalah normal, sebaliknya jika probabilitas *Asimp. Sig (2-tailed)* < *level of significant*, maka sebaran data adalah tidak normal. Untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan SPSS 12.0 ditampilkan pada Tabel V.11 sebagai berikut:

Tabel V. 11
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,138283E-09
	Std. Deviation	,8744746
Most Extreme Differences	Absolute	,145
	Positive	,077
	Negative	-,145
Kolmogorov-Smirnov Z		,617
Asymp. Sig. (2-tailed)		,841

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil diatas dapat diketahui jika *Asym. Sig (2-tailed)* semua variabel yaitu sebesar $0,841 >$ dari *level of significant* $0,05$, maka H_0 diterima yang berarti data semua variabel terdistribusi secara normal. Dengan demikian dari hasil analisis data semua variabel disimpulkan bahwa sebaran data adalah normal, sehingga pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik regresi linier.

D. Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimanakah persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik yang diwakili dengan variabel Y, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS 12.0 sebagai berikut :

Tabel V. 12
Hasil Pengolahan Data
Persepsi akuntan publik terhadap independensi pemeriksaan
Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	1	5,6	5,6	5,6
Sangat Setuju	17	94,4	94,4	100,0
Total	18	100,0	100,0	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden menjawab setuju sebanyak satu orang atau 5,6% dan 17 orang atau 94,4% menjawab sangat setuju seperti pada Tabel V.12 di atas. Maka persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik adalah sangat baik.

2. Untuk menjawab permasalahan kedua mengenai faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik, dengan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Model persamaan regresi berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

Y = Independensi pemeriksaan akuntan publik

X₁ = Hubungan keuangan

X₂ = Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien

X₃ = Jasa-jasa lainnya selain audit

X₄ = *Fee* audit

b. Model Summary

Pada bagian ini ditampilkan nilai R, R², adjusted R² dan standard error of the estimate. Dimana nilai R² merupakan indek determinasi yakni persentase pengaruh variabel X₁, X₂, X₃, X₄ terhadap Y.

Tabel V.13

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,887 ^a	,787	,722	,70

a. Predictors: (Constant), X₄, X₂, X₁, X₃

b. Dependent Variable: Y

Angka R sebesar 0,887 menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi antara independensi pemeriksaan akuntan publik dengan 4 variabel bebasnya adalah kuat karena diatas 0,05. Angka *R square* atau koefisien

determinasi adalah 0,787. Namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2 akan semakin baik bagi model regresi apabila menggunakan *adjusted R square*. Karena dengan menggunakan *adjusted R square*, variabel bebas bisa menjelaskan variabel tergantung lebih besar. Pada tabel *adjusted R square* yaitu 0,722 yang berarti variasi dari independensi pemeriksaan akuntan publik bisa dijelaskan oleh variasi dari 4 variabel independen.

Standard Error of the Estimate adalah 0,70 yang berarti kesalahan untuk memprediksi independensi pemeriksaan akuntan publik dari keempat variabel bebas yang ada adalah 0,70. Semakin kecil *standard error of the estimate* berarti semakin baik karena kesalahan untuk memprediksinya semakin kecil.

c. Uji koefisien regresi secara serempak atau uji F

Pada bagian ini ditampilkan tabel analisis varians (ANOVA). Uji ANOVA sebenarnya digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh hubungan keuangan, tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien, jasa-jasa lainnya selain audit dan *fee* audit secara bersama-sama terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik. Dengan demikian lebih tepat untuk diterapkan pada analisis regresi berganda. Untuk menentukan tingkat signifikansi dilakukan uji F dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, artinya variabel hubungan keuangan, tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien, jasa-jasa lainnya selain audit, *fee* audit secara bersama-sama

tidak berpengaruh terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik.

$H_1: b_1 = b_2 = b_3 = b_4 \neq 0$, artinya variabel hubungan keuangan, tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien, jasa-jasa lainnya selain audit, *fee* audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik.

Tabel V. 14

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23,316	4	5,829	12,038	,000 ^a
	Residual	6,295	13	,484		
	Total	29,611	17			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Besarnya F_{tabel} dengan tingkat signifikansi (α) 0,05 untuk pengujian koefisien regresi secara adalah berikut:

$$df1 = k$$

$$= 4$$

$$df2 = n - k - 1$$

$$= 18 - 4 - 1$$

$$= 13$$

$$F_{\text{tabel}} 0,05 (4), (13) = 3,179$$

Dengan kriteria penerimaan dan penolakan Hipotesis adalah:

H_0 ditolak jika: $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, atau signifikan $< \alpha (0,05)$

Ho diterima jika: $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau signifikan $> \alpha (0,05)$

Karena sudah diketahui F_{hitung} sebesar 12,038 dan F_{tabel} sebesar 3,179 maka $12,038 > 3,179$ jadi Ho ditolak. Maka bisa disimpulkan bahwa hubungan keuangan, tuntutan diantara Kantor Akuntan Publik dengan klien, jasa-jasa lainnya selain jasa audit, *fee* audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik.

d. Uji koefisien regresi secara parsial atau uji t

Tabel V. 15

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,641	3,350		5,863	,000
X1	-,167	,054	-,425	-3,072	,009
X2	,305	,159	,256	1,915	,078
X3	,546	,177	,564	3,084	,009
X4	-,311	,065	-,868	-4,794	,000

a. Dependent Variable: Y

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi setiap variabel independen.

Untuk menentukan signifikansi dari uji t dilakukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap hubungan keuangan (b_1)

Ho : $b_1 = 0$ artinya tidak ada pengaruh hubungan keuangan pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

H₁ : $b_1 \neq 0$ artinya ada pengaruh hubungan keuangan pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$
- b. H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$

Dari output diatas terlihat t_{hitung} adalah -3,072, sedangkan t_{tabel} adalah 2,160 (tabel t ada dalam lampiran) maka dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak karena $t_{hitung} < -t_{tabel}$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hubungan keuangan dengan independensi pemeriksaan akuntan publik.

2. Pengujian terhadap tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien

$H_0 : b_2 = 0$ artinya tidak ada pengaruh tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

$H_1 : b_2 \neq 0$ artinya ada pengaruh tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$
- b. H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$

Dari output diatas terlihat t_{hitung} adalah 1,915, sedangkan t_{tabel} adalah 2,160 (tabel t ada dalam lampiran) maka dapat diambil keputusan bahwa H_0 diterima karena $t_{hitung} < t_{tabel}$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien dengan independensi pemeriksaan akuntan publik.

3. Pengujian terhadap jasa-jasa lainnya selain audit (b_3)

$H_0 : b_3 = 0$ artinya tidak ada pengaruh jasa-jasa lainnya selain jasa audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

$H_1 : b_3 \neq 0$ artinya ada pengaruh jasa-jasa lainnya selain jasa audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

a. H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

b. H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$

Dari output diatas terlihat t_{hitung} adalah 3,084, sedangkan t_{tabel} adalah 2,160 (tabel t ada dalam lampiran) maka dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara jasa-jasa lainnya selain jasa audit dengan independensi pemeriksaan akuntan publik.

4. Pengujian terhadap *fee* audit

$H_0 : b_4 = 0$ artinya tidak ada pengaruh *fee* audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

$H_1 : b_4 \neq 0$ artinya ada pengaruh *fee* audit pada independensi pemeriksaan akuntan publik.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

a. H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

b. H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$

Dari output diatas terlihat t_{hitung} adalah -4,794, sedangkan t_{tabel} adalah 2,160 (tabel t ada dalam lampiran) maka dapat diambil keputusan bahwa H_0 ditolak karena $t_{hitung} < -t_{tabel}$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *fee* audit dengan independensi pemeriksaan akuntan publik.

- e. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik dilihat dari koefisien regresi.

Dari output koefisien regresi diatas, maka didapat koefisien regresi dan konstanta dengan hasil sebagai berikut:

Hubungan keuangan (b_1)	: -0,167
Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien (b_2)	: 0,305
Jasa-jasa lainnya selain jasa audit (b_3)	: 0,546
<i>Fee</i> audit (b_4)	: -0,311
Konstanta (b)	: 19,641

Dengan diperoleh koefisien regresi dan konstanta tersebut diatas maka pengaruh hubungan keuangan, tuntutan diantara akuntan publik dengan klien, jasa-jasa selain jasa audit dan *fee* audit terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik dapat ditunjukkan dengan persamaan:

$$Y = 19,641 - 0,167X_1 + 0,305X_2 + 0,546X_3 - 0,311X_4$$

Secara sistematis jika $X_1 = X_2 = X_3 = X_4 = 0$ maka nilai $Y = 19,641$. Hal ini berarti apabila unsur-unsur yang terdapat dalam variabel hubungan keuangan, tuntutan diantara kantor akuntan publik dengan klien, jasa-jasa selain jasa

audit dan *fee* audit tidak terpenuhi, maka independensi pemeriksaan akuntan publik sebesar 19,641.

Koefisien regresi X_1 sebesar -0,167 yang berarti semakin akuntan kurang memahami hubungan keuangan dalam pemeriksaan akuntan maka independensi pemeriksaan akuntan publik akan terganggu. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,305 artinya semakin besar akuntan memahami tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien maka independensi pemeriksaan akuntan publik dapat dipertahankan. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,546 artinya semakin besar akuntan memahami jasa-jasa lainnya selain jasa audit dalam pemeriksaan akuntan publik maka independensi pemeriksaan akuntan publik dapat dipertahankan. Koefisien regresi X_4 sebesar -0,311 artinya semakin akuntan kurang memahami tentang *fee* audit dalam pemeriksaan akuntan publik maka akan mengganggu independensi pemeriksaan akuntan publik.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik adalah *fee* audit karena koefisien regresi sebesar -0,311 yang dapat diartikan bahwa setiap pengurangan 1 maka *fee* audit akan mengurangi independensi pemeriksaan akuntan publik sebesar 0,311. Hal ini juga terlihat pada kolom sig pada Tabel V.15 adalah 0,000 atau probabilitas jauh di bawah 0,05 yang berarti *fee* audit benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap independensi pemeriksaan akuntan publik.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Yogyakarta, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Dari olah data yang dilakukan 94,4% responden menyatakan sangat setuju dan 5,6% setuju terhadap item-item kuesioner tentang independensi pemeriksaan akuntan publik. Prosentase diatas menjelaskan persepsi akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik adalah independensi pemeriksaan akuntan publik baik. Yang berarti akuntan publik memperhatikan setiap faktor yang dapat mengganggu independensi pemeriksaannya.

Dari pengolahan data dapat diketahui :

Hubungan keuangan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik karena t_{hitung} sebesar -3,072 lebih kecil dari $-t_{tabel}$ sebesar -2,160 atau H_0 ditolak.

Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien tidak mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik karena t_{hitung} sebesar 1,915 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,160 atau H_0 diterima.

Jasa-jasa lainnya selain jasa audit mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik karena t_{hitung} sebesar 3,084 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,160 atau H_0 ditolak.

Fee audit mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik karena t_{hitung} sebesar -4,794 lebih besar dari t_{tabel} sebesar -2,60 atau H_0 ditolak.

Dari keempat variabel yang di uji oleh peneliti, *fee* audit adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi pemeriksaan akuntan publik karena semakin akuntan kurang memahami *fee* audit maka pemeriksaan akuntan publik akan terganggu independensinya. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,311 dan Sig. dalam Tabel V. 15 sebesar 0.000.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari terdapatnya beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaannya. Oleh karena itu keterbatasan ini hendaknya diperhatikan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Keterbatasan dalam penelitian ini berupa penggunaan kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian. Persepsi dari responden tergantung pada pemahaman butir pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner karena tidak dilengkapi dengan metode pengumpulan data yang lainnya untuk keakuratan data yang diteliti, seperti wawancara.

Keterbatasan kedua, berkaitan dengan pemilihan jumlah sampel penelitian yang masih terbatas pada empat Kantor Akuntan Publik di wilayah Yogyakarta. Dari keempat Kantor Akuntan Publik tersebut, hanya 18 responden yang diteliti dari 59 orang akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta.

Saran

Untuk memperbaiki dan melengkapi penelitian dimasa yang akan datang dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Kantor Akuntan Publik

Independensi yang dimiliki akuntan telah memadai, hendaknya dapat dipertahankan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksaan, mengingat terus berkembangnya pengguna laporan audit dalam globalisasi saat ini.

Bagi peneliti berikutnya

Peneliti yang berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang berbeda, Kantor Akuntan Publik yang berbeda serta teknik analisis yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nugroho, Bhuono. (2005). *Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Amir Abadi Jusuf. *Auditing: Pendekatan Terpadu*. (1993). Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Azwar, Saifuddin. (2001). *Dasar-Dasar Psikometri*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. (2002). *Tes Prestasi. Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar*. Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Christiawan, Y.J. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik (2002). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 4, No. 2, November 2002 : 79-92. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Hadi, Sutrisno. (1991). *Statistik*. Jilid Kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Jusup, Haryono. (2000). *Auditing*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- (2002). *Auditing*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1991). Balai Pustaka
- Kosasih, Ruchyat. (1982). *Auditing: Prinsip dan Prosedur*. Yogyakarta: Penerbit Ananda.
- Kurniawati, F.R. (2004). Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan. *Skripsi*. Yogyakarta: FE USD.
- Margono. (2000). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta.
- Mayangsari, Sekar. (2003). Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Volume 6, N0. 1, Januari.

- Mulyadi. (1998). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mulyadi. (1992). *Pemeriksaan Akuntan*. Edisi 4. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Munawir. H. S. (1999). *Auditing Modern*. Buku 1. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Noegroho, Boedijoewono (2001). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Sihwahjoeni. Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 3, No. 2, Juli 2000 : 168-184. IAI-KAP. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono (2003). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Supriyono, R.A. (1988). *Pemeriksaan Akuntan (Auditing)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Umar, Husein. (2001). *Riset Akuntansi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Husein. (2003). *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Penerbit GHALIA INDONESIA.
- Wahyudi, Salamah (1993). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Surakarta: Penerbit Sebelas Maret University Press.

www.iaiglobal.or.id



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2904

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk No : 31/Kaprodi/Akt/129/VI/2006
Tanggal : 17 Mei 2006 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang
Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : IGNATIUS NOVIWIDIANTO No. Mhs./NIM : 002114153
Alamat Instansi : Mrican, Yogyakarta
Judul : PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP INDEPENDENSI PEMERIKSAAN
AKUNTAN PUBLIK

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 22 Mei 2006 s/d 22 Agustus 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

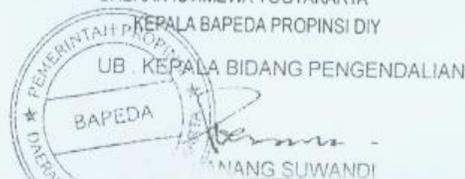
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Dekan Fak. Ekonomi - USD Yk;
4. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55185 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

NOMOR : 070/1036
2261/34

Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2904 Tanggal : 22/05/2006

1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditanyakan Kepada : Nama : IGNATIUS NOVIWIDIANTO NO MHS / NIM : 002114153
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD
Alamat : Mrican, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. FA. Joko Siswanto, MM, Akt
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP INDEPENDENSI PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK

Asas/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 22/05/2006 Sampai 22/08/2006
Mempunyai : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Adapun Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

IGNATIUS NOVIWIDIANTO

- Ditubuhkan Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
Ka. BAPEDA Prop. DIY
Pimp. Kantor Akuntan Publik Kumalahadi Yk.
Pimp. Kantor Akuntan Publik Sri Suharmi Yk.
Pimp. Kantor Akuntan Publik Suroso Yk.
Pimp. Kantor Akuntan Publik Drs. Pamudji, Ak. Yk.
Pimp. Kantor Akuntan Publik Abdul Muntolib Yk.
Pimp. Kantor Akuntan Publik HLB. Hadori Yk.
Pimp. Kantor Akuntan Publik Suhartadi Yk.
Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12/06/2006

An : Kepala
Ka. Bidang Pelayanan

Drs. SUTARTO
NIP. 090020004



SURAT KETERANGAN

Surat keterangan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Iganatius Noviwidianto
NPM : 002114153
Jurusan : Ekonomi
Fakultas : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Universitas : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

yang melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner di Kantor Akuntan Publik (KAP) kami:

 KAP 1	 KAP 2	 KAP 3
 KAP 4	 KAP 5	 KAP 6
 KAP 7	 KAP 8	 KAP 9

Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Akuntan Publik

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "*Persepsi Akuntan yang Bekerja pada Kantor Akuntan Publik terhadap Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik*".

Sehubungan dengan itu, saya mohon kerelaan Bapak/Ibu Akuntan Publik untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi daftar pertanyaan yang bersama ini saya lampirkan sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu alami dan rasakan. Segala informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya demi kepentingan ilmiah.

Atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ignatius Noviwidianto
NIM : 002114153

Bagian I

Petunjuk : Sudilah Bapak/Ibu mengisi data diri dalam kolom dibawah ini sesuai dengan keadaan dan kondisi Bapak/Ibu yang sesungguhnya

- | | | |
|------------------------|----------------------|----|
| 1. Umur | : | th |
| 2. Jabatan | : | |
| 3. Lama Bekerja | : | th |
| 4. Pendidikan terakhir | : | |
| a. | S1 | |
| b. | Profesi Akuntan | |
| c. | S-2 (sebutkan |) |
| d. | S-3 (sebutkan |) |

Bagian II

Petunjuk : Sudilah Bapak/Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat dan kondisi Bapak/Ibu dengan memberi tanda silang (X) pada kolom jawaban SS (jika Sangat Setuju), S (jika Setuju), RR (jika Ragu-ragu), TS (jika Tidak Setuju), STS (jika Sangat Tidak Setuju).

No.	KETERANGAN	SS	S	RR	TS	STS
1	Hubungan Keuangan Bila saya sebagai akuntan publik membeli atau memiliki saham suatu perusahaan yang akan saya audit. Hal ini akan merusak independensi pemeriksaan yang akan saya lakukan.					
2	Kepemilikan investasi tidak langsung juga akan melanggar independensi pemeriksaan akuntan publik.					
3	Jika kantor akuntan saya melakukan pinjaman dengan klien. Maka pinjaman yang jumlahnya kecil, hipotek rumah, dan sebagian besar pinjaman tanpa jaminan tidak mengganggu independensi pemeriksaan.					
4	Pengecualian dalam pinjaman dengan klien harus dilakukan menurut prosedur peminjaman, jangka waktu, dan persyaratan yang lazim.					
5	Apabila saudara dari akuntan publik memiliki hubungan keuangan dengan klien yang akan diauditnya, hal ini merupakan pelanggaran dalam hal mempengaruhi independensi.					
6	Akuntan publik memiliki saham pada suatu perusahaan klien yang tidak diauditnya tetapi klien akuntan publik yang akan diaudit juga memiliki saham pada perusahaan klien yang tidak diaudit. Hal ini dapat mempengaruhi independensi pemeriksaan.					

7	Jika seorang akuntan publik menjadi anggota dewan direksi atau pengurus perusahaan yang akan diauditnya, maka kemampuannya dalam mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan klien akan terpengaruh.					
8	Akuntan publik dapat melaksanakan audit dan sekaligus menjadi direktur bagi organisasi nirlaba, seperti organisasi sosial dan agama sepanjang profesinya semata-mata bersifat kehormatan tanpa merusak independensinya.					
9	Tuntutan antara Kantor Akuntan Publik dengan Klien Jika terdapat tuntutan hukum atau maksud untuk mengadakan tuntutan hukum antara sebuah kantor akuntan publik dengan klien, maka kemampuan akuntan publik tersebut untuk tetap bersikap obyektif diragukan.					
10	Apabila kantor akuntan publik menuntut klien karena kecurangan atau penggelapan, maka independensi pemeriksaan dianggap dapat terganggu.					
11	Pertimbangan utama dalam semua tuntutan adalah kemungkinan pengaruh pada kemampuan klien dan akuntan publik untuk tetap bersikap obyektif dan memberi pernyataan secara bebas.					
12	Jasa-jasa Lainnya Selain Audit Seorang akuntan publik yang memberi jasa penyusunan laporan keuangan pada perusahaan klien tidak diperbolehkan melakukan jasa audit sekaligus.					
13	Sebagai seorang akuntan publik yang menggunakan jasa auditing, atestasi, review, konsultasi manajemen atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).					
14	Apapun jasa atau kapasitasnya, seorang akuntan publik harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektifitas.					
15	Seorang akuntan publik tidak diperkenankan menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon-calon klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan.					
16	Fee Audit Akuntan publik tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka.					

17	Sebagai seorang akuntan publik, saya akan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan lain sepanjang tidak merusak citra profesi.					
18	Besarnya fee akuntan publik dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.					
19	Fee akuntan publik tidak boleh tergantung pada hasil yang diinginkan oleh klien.					
20	Seorang akuntan publik dilarang mengiklankan, atau mengizinkan orang lain untuk mengiklankan nama atau jasa yang diberikannya kecuali bersifat pemberitahuan.					
21	Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang lain dengan cara menawarkan atau menjanjikan fee yang jauh lebih rendah daripada fee yang sebelumnya.					
22	Independensi seorang akuntan publik dapat dipertanyakan bila penugasan dan pembayaran fee auditor ditanggung oleh pihak manajemen.					
23	Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik Sebagai seorang akuntan publik, saya harus menerima setiap penugasan yang diberikan klien, meskipun tidak diperbolehkan jasa akuntansi sekaligus					
24	Sebagai seorang auditor saya tidak boleh memiliki hubungan keuangan dengan klien.					
25	Seorang auditor dalam menjalankan usaha atau pekerjaan yang diberikan klien harus dapat independen.					
26	Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensi.					

Uji Validitas Variabel Hubungan Keuangan (X1)

Correlations

		TOTAL1
X1.1	Pearson Correlation	,888**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18
X1.2	Pearson Correlation	,546*
	Sig. (2-tailed)	,019
	N	18
X1.3	Pearson Correlation	,627**
	Sig. (2-tailed)	,005
	N	18
X1.4	Pearson Correlation	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18
X1.5	Pearson Correlation	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18
X1.6	Pearson Correlation	,772**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18
X1.7	Pearson Correlation	,810**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18
X1.8	Pearson Correlation	,864**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18

** . Correlation is significant at the 0.01 level

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Variabel Hubungan Keuangan (X1)

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (S P L I
T)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1.1	32,4444	8,4967	,8493	,8508
X1.2	32,6667	9,6471	,4279	,8884
X1.3	32,3889	9,4281	,5266	,8800
X1.4	32,3889	8,7222	,7939	,8568
X1.5	32,2778	9,1536	,7322	,8647
X1.6	32,3333	9,0588	,7068	,8653
X1.7	32,3333	8,9412	,7541	,8614
X1.8	32,5556	6,4967	,7496	,8826

Reliability Coefficients

N of Cases =	18,0	N of Items =	8
Correlation between forms =	,7336	Equal-length Spearman-Brown	
=	,8463		
Guttman Split-half =	,8310	Unequal-length Spearman-	
Brown =	,8463		
4 Items in part 1		4 Items in part 2	
Alpha for part 1 =	,8078	Alpha for part 2 =	
,8194			

Uji Validitas Variabel Tuntutan diantara Kantor Akuntan Publik dengan Klien (X2)

Correlations

		TOTAL2
X2.9	Pearson Correlation	,801**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18
X2.10	Pearson Correlation	,801**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18
X2.11	Pearson Correlation	,722**
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	18

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Uji Reliabilitas Variabel Tuntutan diantara Kantor Akuntan Publik dengan Klien (X2)

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (SPLIT)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X2.9	9,3889	,6046	,5199	,5189
X2.10	9,3889	,6046	,5199	,5189
X2.11	9,3333	,7059	,4051	,6667

Reliability Coefficients

N of Cases = 18,0

N of Items = 3

Correlation between forms = ,4051
= ,5766

Equal-length Spearman-Brown

Guttman Split-half = ,5093
Brown = ,5968

Unequal-length Spearman-

Uji Reliabilitas Variabel Fee Audit (X4)

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (SPLIT)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X4.16	25,2778	11,1536	,4943	,8572
X4.17	24,8333	12,1471	,4621	,8633
X4.18	25,3889	10,6046	,9036	,8217
X4.19	25,5556	9,2026	,8153	,8114
X4.20	26,2778	6,6830	,7341	,8814
X4.21	25,3333	10,7059	,8154	,8278
X4.22	25,3333	10,7059	,8154	,8278

Reliability Coefficients

N of Cases =	18,0	N of Items =	7
Correlation between forms =	,8484	Equal-length Spearman-Brown	
=	,9180		
Guttman Split-half =	,9111	Unequal-length Spearman-	
Brown =	,9194		
4 Items in part 1		3 Items in part 2	
Alpha for part 1 =	,7680	Alpha for part 2 =	
,7129			

Uji Validitas Variabel Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik (Y)

Correlations

		TOTAL5
Y23	Pearson Correlation	,717**
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	18
Y24	Pearson Correlation	,716**
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	18
Y25	Pearson Correlation	,582*
	Sig. (2-tailed)	,011
	N	18
Y26	Pearson Correlation	,805**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	18

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level

Uji Reliabilitas Variabel Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik (Y)

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (SPLIT)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
Y23	13,8889	1,1634	,5215	,5478
Y24	14,1111	1,0458	,4332	,5906
Y25	14,0556	1,2320	,2549	,7082
Y26	14,1111	,9281	,5816	,4754

Reliability Coefficients

N of Cases = 18,0

N of Items = 4

Correlation between forms = ,3430
= ,5109

Equal-length Spearman-Brown

Guttman Split-half = ,5103 Unequal-length Spearman-
 Brown = ,5109

2 Items in part 1

2 Items in part 2

Alpha for part 1 = ,7021
 ,5742

Alpha for part 2 =

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,138283E-09
	Std. Deviation	,8744746
Most Extreme Differences	Absolute	,145
	Positive	,077
	Negative	-,145
Kolmogorov-Smirnov Z		,617
Asymp. Sig. (2-tailed)		,841

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Frequencies

Frequency Table

p23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	3	16,7	16,7	16,7
Sangat Setuju	15	83,3	83,3	100,0
Total	18	100,0	100,0	

p24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	7	38,9	38,9	38,9
Sangat Setuju	11	61,1	61,1	100,0
Total	18	100,0	100,0	

p25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	33,3	33,3	33,3
Sangat Setuju	12	66,7	66,7	100,0
Total	18	100,0	100,0	

p26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	7	38,9	38,9	38,9
Sangat Setuju	11	61,1	61,1	100,0
Total	18	100,0	100,0	

Independensi Pemeriksaan Akuntan Publik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	1	5,6	5,6	5,6
Sangat Setuju	17	94,4	94,4	100,0
Total	18	100,0	100,0	

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X2, X1, X3 ^a	,	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,887 ^a	,787	,722	,70

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23,316	4	5,829	12,038	,000 ^a
	Residual	6,295	13	,484		
	Total	29,611	17			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,641	3,350		5,863	,000
	X1	-,167	,054	-,425	-3,072	,009
	X2	,305	,159	,256	1,915	,078
	X3	,546	,177	,564	3,084	,009
	X4	-,311	,065	-,868	-4,794	,000

a. Dependent Variable: Y

Tabel r

n	α	
	5%	1%
3	0,997	0,999
4	0,950	0,990
5	0,878	0,959
6	0,811	0,917
7	0,754	0,874
8	0,707	0,834
9	0,666	0,798
10	0,632	0,765
11	0,602	0,735
12	0,576	0,708
13	0,553	0,684
14	0,532	0,661
15	0,514	0,641
16	0,497	0,623
17	0,482	0,606
18	0,468	0,590
19	0,456	0,575
20	0,444	0,561
21	0,433	0,549
22	0,423	0,537
23	0,413	0,526
24	0,404	0,515
25	0,396	0,505
26	0,388	0,496
27	0,381	0,487
28	0,374	0,478
29	0,367	0,470
30	0,361	0,463
31	0,355	0,456
32	0,349	0,449
33	0,344	0,442
34	0,339	0,436
35	0,334	0,430
36	0,329	0,424
37	0,325	0,418

n	α	
	5%	1%
38	0,320	0,413
39	0,316	0,408
40	0,312	0,403
41	0,308	0,398
42	0,304	0,393
43	0,301	0,389
44	0,297	0,384
45	0,294	0,380
46	0,291	0,376
47	0,288	0,372
48	0,284	0,368
49	0,281	0,364
50	0,279	0,361
55	0,266	0,345
60	0,254	0,330
65	0,244	0,317
70	0,235	0,306
75	0,227	0,296
80	0,220	0,286
85	0,213	0,278
90	0,207	0,270
95	0,202	0,263
100	0,195	0,256
125	0,176	0,230
150	0,159	0,210
175	0,148	0,194
200	0,138	0,181
300	0,113	0,148
400	0,098	0,128
500	0,088	0,115
600	0,080	0,105
700	0,074	0,097
800	0,070	0,091
900	0,065	0,086
1000	0,062	0,081

Sumber: Metode Riset Bisnis, Husein Umar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004

Tabel F

 $\alpha = 5\%$

df2	df1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	161,45	199,50	215,71	224,58	230,16	233,99	236,77	238,88	240,54	241,88	242,98	243,91
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371	19,385	19,396	19,405	19,413
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845	8,812	8,786	8,763	8,745
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041	5,999	5,964	5,936	5,912
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818	4,772	4,735	4,704	4,678
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147	4,099	4,060	4,027	4,000
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726	3,677	3,637	3,603	3,575
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438	3,388	3,347	3,313	3,284
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230	3,179	3,137	3,102	3,073
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072	3,020	2,978	2,943	2,913
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948	2,896	2,854	2,818	2,788
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849	2,796	2,753	2,717	2,687
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767	2,714	2,671	2,635	2,604
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699	2,646	2,602	2,565	2,534
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641	2,588	2,544	2,507	2,475
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591	2,538	2,494	2,456	2,425
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548	2,494	2,450	2,413	2,381
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510	2,456	2,412	2,374	2,342
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477	2,423	2,378	2,340	2,308
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447	2,393	2,348	2,310	2,278
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420	2,366	2,321	2,283	2,250
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397	2,342	2,297	2,259	2,226
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375	2,320	2,275	2,236	2,204
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355	2,300	2,255	2,216	2,183
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337	2,282	2,236	2,198	2,165
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321	2,265	2,220	2,181	2,148
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305	2,250	2,204	2,166	2,132
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291	2,236	2,190	2,151	2,118
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278	2,223	2,177	2,138	2,104
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266	2,211	2,165	2,126	2,092
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180	2,124	2,077	2,038	2,003
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097	2,040	1,993	1,952	1,917
120	3,920	3,072	2,680	2,447	2,290	2,175	2,087	2,016	1,959	1,910	1,869	1,834

Sumber: Ekonometrika Dasar, Damodar Gujarati, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004

Tabel t

df	α				
	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617

Sumber: Ekonometrika Dasar, Damodar Gujarati, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004

